

# **Nasionalisme Tenaga Kerja Indonesia di Daerah Perbatasan Indonesia-Malaysia**

*Anggraeni Primawati*

## **Abstrak**

Istilah nasionalisme biasanya dijelaskan dengan “faham kebangsaan”. Kata bangsa itu sendiri berarti: (1) Kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri; (2) Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Beberapa makna kata ‘bangsa’ di atas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan dan tempat.

Fakta bahwa para TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia, hanya memikirkan kerja untuk memperoleh upah sehingga urusan perut menjadi terselesaikan, sedangkan masalah lain yang berkaitan dengan simbol-simbol kebangsaan, bagi mereka menempati urutan paling belakang. Bukan hanya TKI berpendidikan rendah yang mengabaikan nasionalisme dalam mencari nafkah, para TKI yang berpendidikan cukup tinggi pun ternyata juga kurang memiliki “rasa nasional”. Strategi baru pembangunan daerah perbatasan diperlukan untuk mengatasi persoalan di wilayah perbatasan, khususnya dalam menumbuhkan rasa kebangsaan atau nasionalisme.

**Kata kunci:** nasionalisme, daerah perbatasan, pembangunan.

## **Pendahuluan**

Belakangan ini nasionalisme Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri mulai dipertanyakan. Mengapa demikian? TKI, terutama yang bekerja sudah lama di luar negeri, tidak akan mengenal negaranya dalam arti sudah melupakan negaranya, bahkan semua kegiatan yang ada di negaranya tidak masuk dalam memori pemikirannya. Apakah hal ini berhubungan dengan nasionalisme? Jelas sangat berkaitan, karena nasionalisme dan ekonomi adalah dua sisi mata uang yang sangat erat hubungannya. Bagaimana mungkin rasa nasionalisme bisa terbangun jika kualitas hidup secara ekonomi rendah. Malah isu rekrutmen laskar watania yang dilakukan pemerintah Malaysia beberapa waktu lalu agaknya bisa dibenarkan jika dilihat dari nihilnya lapangan pekerjaan yang diberikan pemerintah

Indonesia. Apalagi dengan gaji yang ditawarkan cukup menggiurkan. Rasa nasionalisme bisa kalah hanya karena kebutuhan untuk bertahan hidup.

Terutama bagi TKI yang berada di perbatasan dengan negara jiran seperti di perbatasan Entikong-Tebedu, warga perbatasan terutama yang berdekatan dengan negara tetangga seperti Malaysia, hampir setiap hari mengadakan kontak ekonomi dengan negara jiran itu. Bahkan untuk bahan pokok sehari-hari, warga perbatasan tetap bergantung ke Malaysia. Maklum saja letak wilayah mereka pun begitu dekat, saking dekatnya sehingga perjalanan ke sana bisa ditempuh lewat darat selama satu jam saja. Selain jaraknya dekat, warga di perbatasan juga mempunyai ikatan kekerabatan dengan Malaysia. Ketergantungan warga perbatasan begitu kuat, terbukti setelah pemberantasan kayu ilegal logging di sekitar perbatasan diberhentikan, serta-merta kegiatan ekonomi mereka terhenti karena cukong yang terlibat penebangan liar henggang ke Malaysia. Akhirnya, penggangguran besar-besaran pun terjadi. Jelas ini sangat berpengaruh bagi kehidupan ekonomi di perbatasan. Sementara lapangan pekerjaan yang dijanjikan pemerintah sebagai kompensasi diberantasnya aktivitas *illegal logging* tidak pernah terwujud.

Sebagai konsekuensinya, ratusan bahkan ribuan warga bekerja di Sarawak, Malaysia Timur. Mereka dipekerjakan sebagai buruh kasar, pembantu rumah tangga, bahkan ada sebagian lainnya yang bekerja di perkebunan karet dan kelapa sawit milik warga Malaysia. Begitu terpuruknya ekonomi perbatasan yang hanya menggantungkan hidupnya di negeri orang. Giliran keuntungan hasil penebangan kayu liar diambil oleh pemerintah dengan alasan akan dikembalikan untuk pendapatan daerah dan perbaikan jalan. Tetapi apa realisasinya? Jalan yang rusak pasca *illegal logging* tetap saja tidak diperbaiki, malah bertambah parah. Tidak hanya di perbatasan barangkali, bahkan keroposnya nasionalisme bisa jadi menyelimuti anak bangsa ini tatkala harga bahan pokok bertambah naik, lapangan pekerjaan sulit, cari uang susah, yang paling parah lagi harga diri bangsa di mata negara lain terinjak-injak. Sehingga tidak heran apabila berpergian ke Malaysia, banyak orang Indonesia malu mengakui identitas negaranya sendiri.

Kondisi ini seolah memberikan pembenaran bahwa nasionalisme bangsa ini mulai redup. WNI yang sering berpergian ke luar negeri malu mengakui identitasnya. Apalagi warga perbatasan yang pendidikannya minim. Salah satu faktor keterbelakangan secara ekonomi di perbatasan adalah diskriminasi ekonomi yang dilakukan pemerintah, tanpa ada perubahan dari tahun ke tahun, meskipun Indonesia telah merdeka selama 65 tahun. Mereka malu

disebut sebagai orang “*Indon*”, yang mempunyai konotasi miskin sebagai pembantu rumah tangga, pekerja kasar dan sebagai pekerja pada bidang-bidang yang berlabel 3D (*Dirty, Dangerous, dan Difficult*).

### **Nasionalisme di Daerah Perbatasan**

Nasionalisme adalah pengindonesiaan dari nationalism, berarti “faham kebangsaan”. Nasi (*nation*) berarti bangsa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994:89), kata bangsa berarti: (1) Kesatuan orang yang bersamaan asal keturunan, adat, bahasa dan sejarahnya serta berpemerintahan sendiri; (2) Golongan manusia, binatang atau tumbuhan yang mempunyai asal-usul yang sama dan sifat khas yang sama atau bersamaan; (3) Kumpulan manusia yang biasanya terikat karena kesatuan bahasa dan kebudayaan dalam arti umum dan yang biasanya menempati wilayah tertentu di muka bumi. Beberapa makna kata ‘bangsa’ di atas menunjukkan arti bahwa bangsa adalah kesatuan yang timbul dari kesamaan keturunan, budaya, pemerintahan dan tempat.

Dengan demikian, definisi nasionalisme adalah suatu faham yang menciptakan dan mempertahankan kedaulatan sebuah negara (dalam bahasa Inggris ‘*nation*’) dengan mewujudkan suatu konsep identitas bersama untuk sekelompok manusia. Menurut para ahli, ikatan nasionalisme tumbuh di tengah masyarakat saat pola pikirannya mulai merosot. Ikatan ini terjadi saat manusia mulai hidup bersama dalam suatu wilayah tertentu dan tidak beranjak dari situ. Saat itu naluri mempertahankan diri sangat berperan dan mendorong mereka untuk mempertahankan negerinya, tempatnya hidup dan menggantungkan diri. Inilah faktor yang melemahkannya. Namun, bila suasananya aman dari serangan musuh dan musuh terusir maka sirnalah kekuatan ini. Di sejumlah negara kekhawatiran akan melemahnya nasionalisme mulai dibicarakan, termasuk di Indonesia yang terus terancam oleh disintegrasi sejak era reformasi yang mulai diganti dengan wacana ‘lokalisme’ akibat semangat ‘otonomi daerah’ yang kebablasan.

Para nasionalis menganggap negara sebagai institusi yang berdiri berdasarkan beberapa ‘kebenaran politik’ (*political legitimacy*) yang bersumber dari teori ‘romantisme’, yaitu ‘identitas budaya’, debat liberalisme yang menganggap kebenaran politik bersumber dari kehendak rakyat atau gabungan kedua teori itu.

Pada mulanya nasionalisme dianut demi mementingkan hak-hak asasi manusia. Pada tahap selanjutnya nasionalisme menganggap kekuasaan kolektif yang terwujud dalam negara

sebagai lebih penting dari kemerdekaan individual, kini terdapat banyak ragam dan model nasionalisme yang utamanya adalah ‘nasionalisme rasis’, nasionalisme agama, dan nasionalisme etnik.

Nasionalisme dimaknai sebagai pedoman gagasan sejumlah pemikir Barat dan filsafat Barat. Namun hal itu tidak sepenuhnya benar, karena pandangan Hegel misalnya, hanya mewakili salah satu model nasionalisme. Pandangan Hegel dapat menggiring sebuah pemerintahan menjadi pemerintahan fasis yang mengajarkan kepatuhan mutlak terhadap pemerintah dalam semua aspek kehidupan nasional. Menurut Hegel, kepentingan negara didahulukan dalam hubungan negara-masyarakat, karena merupakan kepentingan obyektif. Sementara kepentingan masing-masing individu merupakan kepentingan subyektif. Menurutnya, negara adalah ‘ideal’ (*geist*) yang diobyektivikasi dan karenanya individu hanya dapat menjadi sesuatu yang obyektif melalui keanggotaannya dalam negara (Magnis, 2001:46).

Nasionalisme mulai menyebar ke berbagai belahan dunia melalui proses kolonisasi oleh bangsa Eropa. Proses ini memberikan dampak berupa batasan-batasan di wilayah tanah jajahan. Batasan-batasan ini mungkin dibuat oleh bangsa Eropa sesuai dengan kebutuhan administratif mereka saja. Dari pandangan ini muncul pandangan lain bahwa melihat perbatasan sebagai sesuatu yang harus dijaga secara presisi dan dieklusifkan. Dengan kata lain, batas-batas negara dianggap sebagai penanda nyata yang memutus jaringan sosial, baik kekeluargaan ataupun kepentingan lainnya pada masyarakat perbatasan. Bagi negara-negara bekas jajahan seperti Asia Tenggara, nasionalisme ‘hanya’ hadir dalam bentuk imajinasi, pembayangan akan jati diri sebagai sebuah bangsa yang ada dan pada kenyataannya terdiri dari pandangan dari beragam kelompok yang berbeda satu sama lain.

Dengan hal ini terjadi perdebatan antara negara sebagai otoritas dan wujud dari nasionalisme dengan jaringan komunitas-komunitas lokal yang sudah ada sebelum berdirinya negara bangsa. “ *At the outset, nasionalism was an inclusive and liberating force. It broke down the various localism of region, dialect costum and clan, and helped to create large and powerful nation state, which centerlised market and system of administration, taxation and education*” (Smith, 1998:2).

Adanya usaha penyederhanaan terhadap realitas yang ada dilakukan oleh negara untuk mempermudah pengelolaan dan pengawasan. Hal ini mengakibatkan runtuhnya pola-pola

hubungan sosial yang telah lama terbentuk di tengah masyarakat, serta hilangnya bentuk mata pencaharian dan interaksi dengan alam yang sebenarnya telah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat sebelumnya. Dua hal tersebut kemudian digantikan oleh negara dengan formula satu ukuran untuk semua yang mengingkari pengetahuan adaptif lokal (Scott, 2006:16). Kehadiran institusi negara telah memberikan pengaruh dalam kehidupan individu dan bermasyarakat yang tinggal di dalamnya. Hal-hal yang diciptakan negara dan program-program kesejahteraan harus kita terima. Kesejahteraan dikonstruksi oleh kategori-kategori administratif yang menuntun tindakan kita (Foucault, 2002: 101).

Selanjutnya penyederhanaan yang dilakukan negara tersebut berimpitan dengan munculnya negara sebagai wujud dari nasionalisme dengan segala kepentingannya. “Penyederhanaan” yang dilakukan negara ini berlangsung secara ekstrim dengan mengatasnamakan pembangunan nasional, kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh negara disusun atas nama model-model kebudayaan Jawa, misalnya sebagai budaya dominan kaum elite kekuasaan untuk kemudian diterapkan di seluruh pelosok negara dari Sabang sampai Merauke (Scott, 2006). Hal ini mengakibatkan reaksi-reaksi lokal terhadap perubahan sosial dan politik dalam konteks yang lebih besar dan sifatnya khas, bertahan, menghindari dan kemudian tidak menghasilkan apa-apa lalu melemah. Terutama setelah pola-pola hubungan sosial yang lama tidak dapat dipertahankan dengan penyesuaian apa pun (Geertz, 1984: 511-533).

Dengan segala otoritas dan kekuasaannya, negara melakukan pembatasan-pembatasan terhadap teritorinya sendiri. Hal ini dilakukan sebagai bentuk penyederhanaan kompleks realitas yang ada. Terutama jika dalam sebuah teritori terdapat wilayah-wilayah yang secara ekologi, geografi dan politik dianggap tidak penting dan tidak menjadi penting serta tidak menjadi prioritas pengembangan (Scott, 2006). Letaknya yang sangat jauh dari pusat pemerintahan dengan kondisi ekologis serta geografi yang terpencil dan sulit dijangkau, menjadikan wilayah perbatasan sebagai wilayah pinggiran. Dalam hal ini negara mendefinisikan wilayah perbatasan sebagai orang-orang yang terkebelakang yang tinggal di daerah *blank spots* dan rawan secara politis, karena sangat dekat dengan orang-orang dari negara tetangga. Karena itu peran negara di wilayah perbatasan hanya terasa pada momen-momen tertentu saja, yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya alam ataupun berkaitan dengan usaha mempertahankan konfigurasi garis-garis perbatasan.

Dengan adanya batasan-batasan yang ditentukan oleh negara, terjadilah banyak perubahan sosial, politik, dan kultural. Perubahan basis hubungan dalam masyarakat dari basis keturunan dan kekerabatan menjadi hubungan yang berbasis non-keturunan dan kekerabatan. Konsepnya menjadi pertemanan, pertetanggaan. Afiliasi komunitas, agama dan sebagainya menjadi semakin penting. Isu jaringan sosial menjadi relevan dan semakin penting. Pergeseran orientasi teori dari paradigma struktur fungsi ke paradigma proses yang memosisikan manusia sebagai subyek, menjadikan pendekatan jaringan sosial yang memandang sentral manusia sebagai aktor atau subyek relevan untuk dibaca dalam konstruktivisme. Subyektivikasi manusia terjadi dalam konteks konstruktivisme, yakni teori yang memandang manusia sebagai sentral kehidupan sosial, sehingga dalam kajian sosial manusia harus dijadikan pusat analisis gejala sosial budaya.

Perubahan, dinamika dan gerak sosial yang secara analisis berpusat pada analisa hubungan-hubungan sosial menjadi jaringan sosial sebagai pendekatan penting dan relevan kembali berdasarkan teori. Pendekatan jaringan sosial merupakan alternatif teoritis dan metodologis yang mampu menerjemahkan pemikiran konstruktivisme seperti identitas, representativitas, validitas, kolektivitas, refleksivitas, dan sebagainya, terbaca dengan baik dalam bahasan jaringan sosial (Fedyani, 2006). Jaringan sosial adalah suatu pengelompokan yang terdiri atas sejumlah orang, paling sedikit tiga orang, yang masing-masing mempunyai identitas yang tersendiri dan yang masing-masing dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya. Melalui hubungan sosial tersebut mereka dapat dikelompokkan sebagai suatu kesatuan sosial (Suparlan, 2005).

Tujuan-tujuan dari hubungan-hubungan sosial yang terwujud spesifik dan konkret seperti ini, struktur sosial yang lahir dari jaringan sosial tipe ini juga sebentar dan berubah-ubah. Namun, bila tujuan-tujuan untuk memperpanjang tujuan, struktur yang terbentuk pun menjadi relatif stabil. Karena itu, tindakan dalam interaksi yang terjadi dalam tipe ini selalu dievaluasi berdasarkan tujuan-tujuan relasional. Pertukaran (negosiasi) yang terjadi dalam jaringan kepentingan ini diatur oleh kepentingan-kepentingan para pelaku yang terlibat di dalamnya dan serangkaian norma-norma yang sangat umum. Dalam mencapai tujuan-tujuannya, para pelaku bisa memanipulasi hubungan-hubungan kekuasaan dan emosi. Pada jaringan kepentingan ini terdapat ruang bagi tindakan yang lebih besar, sehingga sering kita lihat banyak kemungkinan si pelaku yang bersangkutan memanipulasi hubungan-hubungan sosial yang dimilikinya guna mencapai tujuan-tujuannya.

Bahwa jaringan kepentingan terbentuk atas dasar hubungan-hubungan sosial yang bermakna pada tujuan-tujuan tertentu atau khusus yang ingin dicapai oleh para pelaku, dalam jaringan kepentingan terdapat ruang bagi pelaku untuk memanipulasi hubungan-hubungan sosial guna mencapai tujuan-tujuannya. Sedangkan hubungan sosial atau saling keterhubungan merupakan interaksi sosial yang berkelanjutan (relatif cukup lama atau permanen) yang akhirnya diantara mereka terkait satu sama lain dengan atau oleh seperangkat harapan yang relatif stabil. Sedangkan dalam suatu hubungan yang lain, yang melibatkan pelaku atau pelaku-pelaku lain yang berbeda dari pelaku-pelaku yang semula, jati dirinya bisa berbeda dari yang semula, sesuai dengan corak hubungan mengenai jati dirinya oleh para pelaku dalam hubungan yang lain tersebut (Suparlan, 2005).

Jangan bertanya arti “nasionalisme” terhadap para TKI di luar negeri, khususnya di Malaysia. Mereka hanya memikirkan kerja untuk memperoleh upah, sehingga urusan perut menjadi terselesaikan, sedangkan masalah lain yang berkaitan dengan simbol-simbol kebangsaan, bagi mereka menempati urutan paling belakang. Bukan hanya TKI berpendidikan rendah yang mengabaikan nasionalisme dalam mencari nafkah, para TKI yang berpendidikan cukup tinggi pun ternyata juga kurang memiliki “rasa nasional”.

Ukuran nasionalisme mereka dalam masalah ini adalah, mereka akan dengan senang hati melepas kewarganegaraan Indonesia apabila pemerintah Malaysia bisa menerima mereka menjadi warga negara. Nasionalisme adalah persatuan secara kelompok dari suatu bangsa yang mempunyai sejarah yang sama, bahasa yang sama, dan pengalaman bersama. Tetapi definisi seperti itu jarang terjadi, yang biasa terjadi adalah pemakaian pengertian nasionalisme secara spesifik sehingga rentan terhadap manipulasi. Karena nasionalisme terkadang dipakai untuk bermacam-macam hal, maka pengertiannya harus pula dilihat kasus per kasus.

Posisi nasionalisme dalam kasus-kasus pengusiran TKI dari negeri Malaysia, misalnya, lebih banyak disebabkan karena kesalahan diplomasi serta kesemrawutan Kementerian Luar Negeri dan Pemerintah Indonesia mengurus warganya di luar negeri. Tanpa kata nasionalisme pun adalah kewajiban membela warga negara yang pergi sebagai orang miskin, sebab tidak bisa hidup di negara sendiri. Mestinya yang dipersoalkan adalah, kenapa para TKI itu cari makan di luar negeri. Pada waktu yang lalu secara menyakitkan mereka diusir oleh Malaysia yang juga sama-sama mengalami kesulitan karena kedatangan TKI itu. Mengapa para TKI itu tidak bisa diberikan pekerjaan?

TKI memang menjengkelkan, sebab mereka datang berbondong-bondong lalu diusir tapi masih kembali lagi. Begitu seterusnya, berulang-ulang, yang membuat Malaysia akhirnya kesulitan dengan kasus-kasus yang terjadi dengan para TKI itu. Jika Indonesia lebih kaya dari Malaysia dan menghadapi persoalan serupa, pasti sama saja reaksinya, yakni marah terhadap Malaysia dan ingin menghajar mereka. Masalahnya adalah berilah pekerjaan kepada para TKI itu, sebab mereka sesungguhnya tidak ingin ke Malaysia kalau di Indonesia ada pekerjaan. Bahkan saat para TKI itu di Malaysia, mereka masih bercita-cita untuk mudik lagi ke Indonesia jika sudah mengumpulkan uang. Mereka mau menolong saudaranya, misalnya dengan mengirim uang (remitan) lalu mereka balik lagi ke Malaysia (Primawati, 2008:183-198). Terutama orang Indonesia yang menganggap tempat kelahiran tetap sebagai kampungnya. Perasaan-perasaan sentimentil seperti itu sesungguhnya adalah nasionalisme juga, jika nasionalisme justru ada pada para TKI itu.

Khususnya hubungan kekerabatan atau keluarga antarwarga Indonesia-Malaysia di kawasan perbatasan Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat, masih sangat erat. Hubungan keluarga itu diikat dalam berbagai bentuk, di antaranya perkawinan antarwarga yang berbeda status kewarganegaraan dan hubungan lapangan pekerjaan, demikian kata Kepala Desa Suruh Tembawang Kecamatan Entikong, Imran Manuk, di Entikong. Hubungan antarwarga perbatasan Entikong dengan warga perbatasan Malaysia sangat baik, karena tidak saja terkait persoalan ekonomi, dalam hal mencari lapangan pekerjaan di negeri jiran, tetapi juga karena pertalian persaudaraan yang masih ada. Adat-istiadat sama, demikian juga bahasa, bahkan tak sedikit yang diikat dengan pertalian perkawinan. Keluar masuknya orang dan barang melalui “jalan tikus” atau setapak di kawasan perbatasan, bukan hal yang baru. Maksudnya, masalah itu tidak perlu dipersoalkan oleh pemerintah, tetapi bagaimana pemerintah membina warga di kawasan perbatasan agar tidak luntur rasa nasionalismenya.

Walaupun semua warga tahu, jika berbicara rasa nasionalisme, maka tidak perlu diragukan bagaimana tingginya rasa nasionalisme warga perbatasan. Tetapi rasa nasionalisme itu bisa luntur, jika mereka secara terus-menerus dan bertahun-tahun tidak mendapat perhatian pemerintah Indonesia. Itu bisa terjadi, karena setelah 65 tahun Republik Indonesia merdeka, warga Indonesia yang tinggal di kawasan perbatasan belum menikmati “indahnyanya kemerdekaan” seperti halnya saudara-saudara mereka yang tinggal di negara tetangga. Untuk itu, jika pemerintah tidak mau kehilangan kawasan perbatasan, mesti memperhatikan secara serius pembangunan di perbatasan. Banyak hal yang sudah dikuasai negara Malaysia di

kawasan perbatasan. Secara ekonomi, 90 persen barang adalah produksi Malaysia. Begitu pula bagi masyarakat yang mencari pekerjaan dan menjual hasil pertanian juga ke pasar negara Malaysia. Sedangkan informasi, baik televisi, radio maupun lainnya aksesnya juga ke Malaysia, artinya warga perbatasan cenderung lebih kenal dengan negara tetangga, ketimbang negaranya sendiri. Masalah itu bisa terjadi karena kurangnya perhatian pemerintah dalam berbagai hal di kawasan perbatasan, sehingga membuat masyarakat jauh tertinggal dan terisolir.

Jika melihat persoalan itu, kawasan perbatasan yang disebut sebagai wajah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) mesti segera dibangun. Perbedaan antara warga Indonesia dengan warga Malaysia sangat kentara, ibarat siang dan malam. Sementara adat-istiadat, hubungan darah dan persaudaraan masih sangat kental, jangan sampai rasa nasionalisme dan kecintaan warga perbatasan terhadap NKRI memudar, hanya gara-gara tidak mendapat perhatian serius dari pemerintah. Sementara mereka sudah berjuang habis-habisan membela kedaulatan NKRI saat melawan para penjajah. Terkait itu Camat Entikong Ignatius Irianti menjelaskan, tidak tertutup kemungkinan akan terjadi krisis kepercayaan dari masyarakat yang ada di tapal batas Indonesia-Malaysia apabila pemerintah pusat tidak mencurahkan perhatian yang serius terhadap permasalahan yang terjadi. Ia mengatakan, selaku kepala wilayah Kecamatan Entikong, sering memberikan masukan maupun saran kepada pejabat pusat yang melakukan kunjungan di tapal batas. Bahkan beberapa waktu lalu ia menjelaskan permasalahan yang ada di perbatasan agar permasalahan perbatasan bisa dicarikan solusinya, baik dari segi peningkatan infrastruktur, ekonomi, pertahanan maupun sosial budaya. Kita harapkan apa yang telah dibicarakan dengan pejabat pusat bisa membawa angin segar bagi daerah perbatasan.

Para TKI itu hanya memikirkan kerja untuk memperoleh upah sehingga terselesaikan masalah ekonominya. Ukuran nasionalisme mereka dalam masalah ini adalah, mereka kadang-kadang dengan senang hati melepas kewarganegaraan Indonesia apabila negara Malaysia bisa menerima mereka menjadi warga negara. Ada pengakuan jujur seorang TKI yang mengaku lahir di Sarawak. “Meski orangtua saya dari Entikong, namun saya lahir, dibesarkan, dan bersekolah di negara Malaysia.” Saat ini dia sedang mengurus administrasi karena kewajiban setiap tenaga kerja asing di negeri jiran itu harus mempunyai job order dan paspor kerja.

Masyarakat Indonesia di wilayah perbatasan antara Kalimantan Barat dan Sarawak (Malaysia) lebih menyukai melakukan jual-beli atau barter ke wilayah Malaysia karena mudah dijangkau dengan berjalan kaki, demikian kata Dewan Adat Dayak (DAD) Kecamatan Sekayam Yordanus Pinjamin di Balai Karang Sanggau. Kalau berbicara nasionalisme, komitmen masyarakat perbatasan tidak perlu diragukan lagi. NKRI tetap merupakan harga mati. Namun, untuk mata pencaharian, jual-beli atau barter, warga perbatasan lebih memilih ke Malaysia. Masyarakat melakukan jual-beli ke Malaysia, bukan karena harga barang lebih murah, tetapi karena di negeri jiran tersebut ada penampungan hasil bumi yang sudah dikenal masyarakat, sedangkan di Pontianak atau Indonesia tidak ada. Bahkan di negara bagian Sarawak, barang-barang masyarakat perbatasan masih bisa dibarter dengan barang-barang Malaysia yang dikehendakinya. Salah satu hasil bumi yang dijual adalah sayur-sayuran dan rempah-rempah, seperti lada, yang sangat diminati warga Malaysia.

Disamping itu kondisi jalan ke tempat jual-beli di Malaysia bisa ditempuh dengan berjalan kaki saja, sedangkan di pasar kecamatan akses jalan masih sulit dan kondisi alam mengharuskan menggunakan jalur sungai. Kegiatan pergi ke Malaysia hampir dilakukan tiap hari, sebab untuk pergi ke sana bisa jalan kaki dalam beberapa jam saja. Juga yang membuat warga perbatasan memilih ke Malaysia adalah adanya faktor kekerabatan, yang masih memiliki kerabat yang tinggal di Malaysia. Jadi, keluar masuk Malaysia tidak ada masalah yang berarti, karena mereka masih satu rumpun.

Di Indonesia masih banyak kabupaten yang tertinggal dan di antaranya adalah daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Karena itu kita harus berpikir ulang, apakah wajah Indonesia itu hanya pada capital city atau juga harus melihat wilayah perbatasan sebagai wajah Indonesia? Pertanyaan ini perlu diungkap, sebab jangan sampai kita hanya melihat capital city sebagai wajah Indonesia sementara daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga dibiarkan merana. Jika negara tetangga yang berbatasan langsung itu sama dengan daerah perbatasan Indonesia, mungkin tidak menimbulkan masalah. Akan tetapi jika daerah perbatasan negara tetangga tersebut sangat sejahtera, sementara daerah perbatasan Indonesia miskin, maka akan menyebabkan problem serius.

Betapa jauh perbedaan antara warga negara Indonesia yang berbatasan langsung dengan warga Malaysia di Kalimantan Barat. Sementara warga Malaysia dengan tanaman produktif (kelapa sawit) dapat mengakses kesejahteraan ekonomi yang tinggi, sebaliknya warga Indonesia dalam keadaan yang belum sejahtera. Itulah yang menyebabkan munculnya

problem “perasaan nasionalisme” yang rendah terkait dengan disparitas pendapatan yang dialami oleh warga negara Indonesia tersebut. Inilah yang bisa menjadi penyebab memudarnya semangat nasionalisme di kalangan warga negara di wilayah perbatasan. Karena itu maka salah satu cara agar wawasan kebangsaan terus menjadi pilar kehidupan masyarakat Indonesia adalah dengan menjadikan wilayah perbatasan sebagai prioritas program pembangunan. Bukan hanya sekedar kepedulian, akan tetapi pemerintah harus terlibat secara memadai agar keinginan untuk mengentaskan masyarakat miskin di wilayah perbatasan dapat terealisasi.

Mungkin Kementerian Negara Daerah Tertinggal harus diberi kewenangan lebih besar untuk mengatasi pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal. Anggaran di beberapa kementerian atau sektor lain yang dianggap kurang menjadi prioritas hendaknya diarahkan ke kementerian yang memiliki fungsi untuk mengentaskan kemiskinan di daerah kemiskinan. Pemecahan anggaran ke berbagai kementerian dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan kiranya dapat didesain ulang. Melalui penguatan program pengentasan kemiskinan di daerah tertinggal dan secara khusus pada daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga, maka kesenjangan antara daerah perbatasan negara tetangga dengan daerah perbatasan Indonesia tentunya akan semakin menyempit dan dalam waktu terukur akan menjadi sama bahkan melampaui.

Nasionalisme dan wawasan kebangsaan akan tetap menjadi pilihan masyarakat jika pemenuhan kebutuhan mendasar warga masyarakat terpenuhi. Maka, agar Indonesia ke depan dapat menjadi negara yang selalu dibela oleh warga negaranya, para warga negara itu juga harus merasa memperoleh sesuatu yang membuat mereka bangga menjadi warga negara. Di era sekarang rasanya sudah ada perubahan. Jika dulu orang mengatakan “jangan tanya kepada negara apa yang kau berikan, tanyalah apa yang kau sumbangkan kepada negara”, di era global dewasa ini dalilnya berubah menjadi “ada relasi timbal-balik antara pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan kesediaan bela negara”.

### **Kemiskinan di Perbatasan Indonesia-Malaysia**

Komitmen untuk melaksanakan pembangunan nasional tentunya menjadi tanggungjawab semua komponen bangsa, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat itu sendiri. Konteks seperti ini tentunya harus dilakukan dengan pendekatan secara holistik yang mencakup semua bagian dan wilayah bangsa. Sejarah masalalu tentang sentralisasi harus kita jadikan sebagai

motivasi dan acuan untuk melakukan pembangunan di daerah-daerah yang selama ini proses pembangunannya belum maksimal. Hal ini tentunya sejalan dengan semangat desentralisasi pembangunan. Salah satu wilayah yang selama ini kurang optimal proses pembangunannya adalah wilayah-wilayah perbatasan. Padahal jelas bahwa wilayah perbatasan antarnegara adalah beranda depan bangsa, serta daerah jauh dari pusat yang dianggap banyak kalangan sebagai beranda belakang bangsa. Untuk itu diperlukan komitmen untuk melakukan pembangunan secara holistik di wilayah perbatasan negara.

Harus disadari pembangunan di perbatasan menjadi amat penting karena perbatasan memiliki beberapa nilai strategis, yang antara lain meliputi: (a) Mempunyai potensi sumber daya yang besar pengaruhnya terhadap aspek ekonomi, demografi, politis dan hankam serta pengembangan ruang wilayah sekitarnya; (b) Mempunyai dampak penting baik terhadap kegiatan yang sejenis maupun kegiatan yang lainnya; (c) Merupakan faktor pendorong bagi peningkatan kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat, baik di wilayah yang bersangkutan maupun di wilayah sekitarnya; (d) Mempunyai keterkaitan yang saling mempengaruhi dengan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah lainnya yang berbatasan baik dalam lingkup nasional maupun regional; (e) Mempunyai dampak terhadap kondisi politis serta pertahanan keamanan nasional dan regional.

Tantangan percepatan ditunjukkan untuk melindungi segenap dan kedaulatan seluruh wilayah negara, mengamankan pembangunan wilayah dan memelihara kerjasama dengan negara tetangga guna mewujudkan prinsip hidup berdampingan secara damai, aman, dan sejahtera. Berdasarkan data yang dimiliki Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal per akhir tahun 2006, total jumlah penduduk yang ada di kabupaten-kabupaten di daerah perbatasan adalah 4,4 juta jiwa, atau rata-rata per kabupaten perbatasan sekitar 174.018 jiwa, dengan persebaran penduduk rata-rata adalah 51 jiwa per 1 kilometer persegi. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah penduduk di daerah perbatasan relatif kecil, atau kurang sebanding dengan luar wilayahnya. Dan, secara lebih jauh, kondisi masyarakatnya adalah miskin.<sup>1</sup>

Aspek sosial ekonomi daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik daerah yang kurang berkembang (terbelakang), yang disebabkan antara lain oleh lokasinya yang relatif terisolir/terpencil dengan tingkat aksesibilitas yang rendah, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat, rendahnya tingkat kesejahteraan sosial ekonomi masyarakat daerah

---

<sup>1</sup> <http://www.kpdt.web.id/articel/2tahun/2008/bulan/02/tanggal/02/id/111>.

perbatasan (jumlah penduduk miskin dan desa tertinggal), langkanya informasi tentang pemerintah dan pembangunan yang diterima oleh masyarakat di daerah perbatasan (*blank spots*). Aspek pertahanan dan keamanan daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik luasnya wilayah pembinaan dan pola penyebaran penduduk yang tidak merata, sehingga menyebabkan rentang kendali pemerintahan sulit dilaksanakan, serta pengawasan dan pembinaan teritorial sulit dilaksanakan dengan mantap dan efisien. Aspek politis daerah perbatasan ditunjukkan oleh karakteristik kehidupan sosial ekonomi masyarakat daerah perbatasan yang relatif lebih berorientasi kepada kegiatan sosial ekonomi di negara tetangga.

Kondisi inilah yang semestinya mendorong bergulirnya berbagai program pengentasan kemiskinan bagi daerah perbatasan. Ini dilakukan mengingat masyarakat perbatasan amat rentan dengan ancaman disintegrasi bangsa. Kecemburuan masyarakat melihat kondisi negara lain yang di depan mata bisa jadi berpotensi mendorong isu-isu disintegrasi di kalangan masyarakat sendiri. Untuk itu pemerintah harusnya berkomitmen tegas untuk mengurangi angka kemiskinan di perbatasan, sebagai bagian integral dari upaya untuk menjaga keutuhan wilayah NKRI serta menjaga semangat dan ruh nasionalisme di masyarakat itu sendiri.

Beberapa hal penting yang perlu lebih ditekankan dalam rangka percepatan pembangunan daerah perbatasan antara lain bisa dilakukan dengan: pertama, membangun sebuah kawasan pertumbuhan kerjasama regional, kawasan perbatasan yang berdimensi hankamnas, dan kawasan andalan regional, yang dikembangkan sesuai dengan rencana tata ruangnya dan disesuaikan dengan kondisi, potensi dan aspirasi daerah sekitarnya. Ini penting, mengingat daerah perbatasan sebenarnya memiliki ciri-ciri dan karakteristik yang hampir sama, baik dari topografi politiknya maupun topografi ekonominya, sehingga pengembangan kawasan pertumbuhan regional diharapkan mampu mengurangi serpihan-serpihan sejarah masa lalu dari masyarakat perbatasan itu sendiri.

Kedua, perlunya dibangun berbagai kesepakatan kerjasama antarnegara yang secara geografis berbatasan, baik dalam bidang hankam, ekonomi, serta pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan daerah perbatasan. Berbagai kerjasama semacam ini sebenarnya pernah dilakukan oleh pemerintah, seperti kerjasama segitiga pertumbuhan IMS-GT (Indonesia, Malaysia, Singapore Growth Triangle) atau yang juga dikenal dengan kerjasama segitiga pertumbuhan SIJORI (Singapore Johor Riau), kerjasama segitiga pertumbuhan utara IMT-GT (Indonesia, Malaysia, Thailand Growth Triangle), kerjasama sosial ekonomi yang dijalin antara delapan provinsi di kawasan timur Indonesia dengan provinsi *Northern Territory* di

Australia, yang selanjutnya telah disepakati dan dikembangkan menjadi *Australia Indonesia Development Area* (AIDA) serta berbagai bentuk kerjasama lain yang melibatkan negara-negara yang berbatasan.

Sayangnya berbagai bentuk kerjasama tersebut belum mampu berjalan secara optimal, karena aspek politik dan batas negara yang sampai saat ini masih menjadi perdebatan antarnegara. Simak saja kasus Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan serta kasus pulau Ambalat. Untuk menjembatani hal tersebut dibutuhkan sebuah kebijakan kerjasama yang secara prinsip mendorong peningkatan keserasian pertumbuhan antardaerah dan keserasian antarmasyarakatnya. Hal ini penting untuk meminimalisir kesenjangan ekonomi antardaerah perbatasan dan tentunya pengembangan ekonominya disesuaikan dengan kondisi daerah perbatasan masing-masing. Selain itu, penekanan keserasian juga perlu mempertimbangkan aspek keserasian antarkawasan, yaitu kawasan timur dan kawasan barat. Hal ini didasari fakta daerah perbatasan yang tertinggal dan terisolasi. Percepatan pembangunan daerah perbatasan dengan membangun pusat pertumbuhan tentunya dalam upaya menjadikan daerah perbatasan sebagai kawasan pertumbuhan lintas batas internasional, kawasan perbatasan antarnegara, kawasan yang mendukung kepentingan pertahanan keamanan nasional, kawasan yang cepat berkembang, kawasan yang dapat memacu perekonomian daerah, kawasan yang mempunyai masalah khusus, dan kawasan lainnya yang memiliki pendekatan pembangunan wilayah yang terpadu.

## Kepustakaan

Fedyani, Achmad Saifuddin. 2006. *Antropologi Kontemporer, Suatu Pengantar Kritis Paradigma*, Jakarta, Kencana.

Foucault, Michael. 2001. *Pengetahuan dan Metode Karya-Karya Penting Foucault*. Yogyakarta : Jalasutra.

Geertz, Clifford. 1984. *Culture and Social Change: The Indonesian Case*, MAN 19:511-532.

Primawati, Anggraeni. 2008. *Migrasi Internasional dan Perubahan Masyarakat Lokal: Suatu Studi Mengenai Proses dan Dampak Mobilitas Warga Kecamatan Purwodadi Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah ke Malaysia*. Disertasi pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia. Jakarta.

Scott, John. 1994. "*Social Network Analysis: A Handbook. Second Edition*. London: Sage.

Smith, Anthony D. 1998. "*Nationalism and Modernism: A Critical Survey of Recent Theories of Nation and Nationalism*". Routledge. London.

Suseno, Franz Magnis. 1999. *Karl Marx Dari Utopis ke Perselisihan Revisionisme*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

<http://www.kpdt.web.id/article/2tahun/2008/bulan/02/tanggal/02/id/111/>